

Analisis Pembentukan Opini Publik pada Pemberitaan Aksi Demonstrasi di Pati Tahun 2025 Melalui Media Sosial

Imas Musfiroh¹, Almas Ganesia Vallary², Primo Thoriq Qodri³, Harits Hibatullah Sudrajat⁴

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: imasmusfiroh2708@gmail.com¹, almasvallary2@gmail.com², primoqodri@gmail.com³, harissudrajat92@gmail.com⁴

Article History:

Received: 04 Juli 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: Public Opinion; Social Media; Pati Demonstrations; Agenda-Setting Theory; Digital Literacy.

Abstract: This study aims to analyze the formation of public opinion regarding the coverage of the 2025 Pati demonstrations on social media. A qualitative approach was employed to examine the dynamics of information dissemination, the role of social media, and the process of public opinion formation based on the Agenda-Setting Theory. The findings indicate that social media has transformed the pattern of information distribution, with initial information being disseminated primarily by the public, content creators, and various interconnected digital platforms, while mainstream media serves to verify and reinforce information that has already gained widespread attention. Furthermore, public opinion is formed through the interaction of media framing, content creator activities, platform algorithms, and public emotional responses, resulting in the issue of tax increases in Pati becoming a matter of national concern. From the perspective of the Agenda-Setting Theory, social media functions not only as a medium for disseminating information but also as a mechanism for determining which issues are perceived as important by the public. The study also reveals that the level of digital literacy significantly influences the formation of public opinion, as many individuals do not comprehensively verify information, leading to incomplete or inaccurate perceptions. Therefore, social media plays a dominant role in shaping public opinion by serving as a channel for information dissemination, issue amplification, and a dynamic space for public interaction in the context of the 2025 Pati demonstrations.

Kata Kunci: Opini Publik; Media Sosial; Demonstrasi Pati; Agenda Setting; Literasi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan opini publik pada pemberitaan aksi demonstrasi di Pati tahun 2025 melalui media sosial.

Digital.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dinamika penyebaran informasi, peran media sosial, serta pembentukan opini publik berdasarkan perspektif teori *agenda setting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola distribusi informasi, di mana informasi awal lebih banyak berasal dari masyarakat, konten kreator, dan berbagai platform digital, sedangkan media arus utama berperan dalam melakukan verifikasi dan penguatan informasi. Selain itu, opini publik terbentuk melalui interaksi antara *framing* media, aktivitas konten kreator, algoritma platform, dan respons emosional masyarakat, sehingga isu kenaikan pajak di Pati berkembang menjadi perhatian nasional. Berdasarkan teori *agenda setting*, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat literasi digital memengaruhi proses pembentukan opini publik, karena masih banyak masyarakat yang belum melakukan verifikasi informasi secara menyeluruh sehingga berpotensi menghasilkan persepsi yang kurang utuh. Dengan demikian, media sosial memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk opini publik sebagai penyebar informasi, penguat isu, sekaligus ruang interaksi publik yang dinamis pada kasus demonstrasi Pati tahun 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Internet tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang baru bagi pertarungan wacana dan pembentukan opini publik. Dalam konteks ini, media sosial hadir sebagai platform utama yang memungkinkan setiap individu tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar informasi.

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Melalui kecepatan penyebaran informasi dan jangkauan yang luas, berbagai konten seperti teks, gambar, dan video dapat dengan mudah memengaruhi persepsi publik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan terkait objektivitas dan keakuratan informasi, mengingat konten yang beredar di media sosial tidak selalu melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini membuka peluang bagi munculnya narasi yang bias, bahkan disertai kepentingan tertentu, baik politik, ekonomi, maupun ideologis. Dalam kajian komunikasi politik, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik. Informasi yang disajikan sering kali dikemas dengan sudut pandang

tertentu, penggunaan bahasa yang persuasif, serta penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa opini publik yang terbentuk di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas secara utuh, melainkan hasil dari konstruksi informasi yang tersebar secara masif dan berulang.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam peristiwa aksi demonstrasi yang terjadi di Pati pada tahun 2025, yang menjadi perhatian luas di berbagai platform media sosial. Informasi mengenai peristiwa tersebut tersebar dengan cepat dan disajikan dalam berbagai bentuk serta sudut pandang. Sebagian konten menekankan pada tuntutan masyarakat, sementara yang lain lebih menyoroti potensi konflik atau dampak sosial yang ditimbulkan. Perbedaan penyajian informasi ini menunjukkan adanya proses pembentukan opini publik yang dipengaruhi oleh cara informasi disebarkan dan diterima oleh pengguna media sosial. Selain itu, karakteristik media sosial yang interaktif memungkinkan terjadinya penyebaran opini secara cepat melalui fitur seperti komentar, berbagi (share), dan tanda suka (like). Hal ini memperkuat terbentuknya opini publik secara kolektif, sekaligus mempercepat penyebaran narasi tertentu di tengah masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat dinamis, sehingga berpotensi memengaruhi cara pandang dan penilaian mereka terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pembentukan opini publik terjadi dalam pemberitaan aksi demonstrasi di Pati tahun 2025 melalui media sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika komunikasi politik di era digital, khususnya terkait peran media sosial dalam membentuk persepsi dan opini masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pembentukan opini publik melalui media sosial terkait aksi demonstrasi di Pati tahun 2025. Adapun paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang memandang bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses komunikasi dan interaksi. Dalam hal ini, media sosial seperti Instagram berperan dalam mengonstruksi realitas melalui konten yang disajikan kepada publik.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan dan pemahaman terhadap isu yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Melki Amirus Sholeh, M.Hum., sebagai peneliti dan akademisi.
2. Andromeda Mercury, sebagai pengamat media sekaligus praktisi media.
3. Raffi Mulya, sebagai influencer media sosial yang pernah membahas isu demonstrasi Pati.
4. Dr. H. Joni Kurnianto, ST., MMT (Komisi C DPRD Pati)

Sementara itu, objek penelitian adalah konten media sosial, khususnya pada platform Instagram, yang membahas aksi demonstrasi di Pati tahun 2025.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara daring (online), mengingat data yang dikumpulkan berupa konten media sosial dan wawancara yang dilakukan melalui media komunikasi digital. Adapun waktu penelitian difokuskan pada periode terjadinya dan setelah aksi demonstrasi di Pati tahun 2025. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara daring kepada informan untuk memperoleh perspektif terkait pembentukan opini publik.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa konten media sosial (Instagram) yang relevan dengan aksi demonstrasi di Pati tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Media Sosial dan Media dalam Pemberitaan Demonstrasi Pati

Berdasarkan hasil wawancara, media sosial memiliki peran yang sangat dominan dalam penyebaran informasi terkait demonstrasi di Pati tahun 2025.

1. Menurut Andromeda Mercury, media sosial berfungsi sebagai penyebaran informasi awal yang bergerak sangat cepat, meskipun belum tentu terverifikasi. Ia menegaskan bahwa media mainstream tetap memiliki peran penting sebagai pihak yang melakukan verifikasi dengan cara mengecek langsung fakta di lapangan sebelum disiarkan.
2. Sementara itu, Raffi Mulya menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga mampu membulatkan opini publik. Ia mengibaratkan media sosial sebagai alat yang mengumpulkan berbagai suara masyarakat yang tersebar menjadi satu arah opini yang lebih fokus.
3. Dari sisi akademisi, Milki Amirus Sholih melihat bahwa media sosial menjadi ruang publik digital yang mempercepat arus informasi dan memperluas jangkauan isu. Hal ini menyebabkan isu demonstrasi di Pati yang awalnya bersifat lokal dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional.
4. Di sisi lain, Joni Kurnianto menyampaikan bahwa masyarakat saat ini lebih cepat terpengaruh oleh informasi di media sosial dibandingkan media mainstream. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki daya pengaruh yang kuat dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa.

Dengan demikian, media sosial berperan sebagai penyebar utama dan penguat isu, sedangkan media mainstream berfungsi sebagai verifikator informasi.

Melki Amirus Sholih menjelaskan bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam memperkuat narasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, *“algoritma akhirnya menggiring semua kritik itu menjadi satu kesatuan narasi yang akhirnya dinikmati hampir semua masyarakat”* (Wawancara, 25 April 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga berperan dalam mengonsolidasikan persepsi publik terhadap suatu isu.

Pembentukan Opini Publik dalam Demonstrasi Pati 2025

Pembentukan opini publik dalam kasus demonstrasi Pati 2025 tidak terlepas dari peran narasi, framing, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

1. Menurut Andromeda Mercury, framing media terutama melalui visual seperti massa yang besar dan ekspresi kekecewaan memiliki pengaruh kuat dalam membangun simpati publik secara luas. Ia juga menekankan bahwa opini yang terbentuk di masyarakat bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh cara individu memahami informasi.
2. Sejalan dengan itu, Raffi Mulya menyatakan bahwa opini publik tidak muncul secara tiba-tiba dari media sosial, melainkan berangkat dari keresahan masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Media sosial dan konten kreator kemudian berperan dalam memperkuat dan menegaskan opini tersebut agar tidak terpecah.
3. Dari perspektif Pak Joni Kurnianto pembentukan opini publik juga dipengaruhi oleh komunikasi pemerintah yang kurang efektif. Ia menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan pajak yang tidak dikomunikasikan dengan baik serta pernyataan-pernyataan yang dianggap arogan

memicu kemarahan masyarakat dan memperkuat opini negatif.

4. Sementara itu, Milki Amirus Sholih melihat bahwa dalam era digital, opini publik terbentuk melalui interaksi antara informasi yang tersebar di media sosial dan interpretasi masyarakat terhadap informasi tersebut.

Dengan demikian, opini publik dalam kasus ini terbentuk dari kombinasi antara faktor informasi, narasi media, kondisi sosial masyarakat, serta respons pemerintah.

Peran Algoritma, Viralitas, dan Respons Pemerintah

Faktor lain yang memperkuat pembentukan opini publik adalah algoritma media sosial dan viralitas isu.

1. Menurut Raffi Mulya algoritma media sosial terbentuk dari minat dan keresahan publik. Ketika suatu isu banyak dibicarakan, maka algoritma akan mendorong konten tersebut untuk menjangkau lebih banyak orang. Ia juga menambahkan bahwa konten yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dapat menjadi viral setelah adanya peristiwa besar seperti demonstrasi.
2. Hal ini sejalan dengan pendapat Andromeda Mercury yang menyatakan bahwa fenomena trending topic dan penggunaan tagar membuat isu semakin berkembang luas dan sulit dikendalikan.
3. Namun, di sisi lain, respons pemerintah juga turut memengaruhi arah opini publik. Joni Kurnianto menegaskan bahwa kurangnya komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang memperbesar konflik. Sementara itu, Andromeda Mercury menilai bahwa respons pemerintah yang terlalu reaktif justru memperburuk situasi karena setiap pernyataan dapat dengan mudah tersebar dan diinterpretasikan secara luas oleh masyarakat.
4. Selain itu, opini publik yang terbentuk di media sosial tidak bersifat tunggal. Menurut Joni Kurnianto masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pro terhadap pemerintah, yang kontra, dan yang netral. Hal ini menunjukkan adanya polarisasi opini di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Drone Emprit, percakapan mengenai kenaikan PBB di Pati didominasi sentimen negatif. Tagar seperti **#PatiMelawan**, **#RakyatMelawan**, dan **#Pajak** menjadi medium utama penyebaran opini publik. Tingginya frekuensi penggunaan tagar tersebut menunjukkan bahwa isu kenaikan pajak berhasil menjadi perhatian utama masyarakat digital dan mendorong perluasan diskusi dari tingkat lokal menuju tingkat nasional.

Analisis Pemberitaan Aksi Demonstrasi Pati 2025 di Media Sosial

Berdasarkan hasil temuan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan aksi demonstrasi di Pati tahun 2025 di media sosial tidak berdiri sendiri sebagai proses jurnalistik formal, melainkan merupakan hasil interaksi antara masyarakat, konten kreator, dan media online. Dari keterangan narasumber Andromeda Mercury, media sosial berperan sebagai penyebar informasi awal yang sangat cepat, sementara media mainstream berfungsi sebagai verifikasi fakta. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola distribusi informasi, di mana media sosial menjadi “pintu masuk” informasi sebelum diverifikasi oleh media arus utama. Senada dengan itu, Raffi Mulya menjelaskan bahwa konten di media sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mengikuti keresahan publik yang sudah ada. Artinya, isu demonstrasi Pati menjadi viral karena adanya dorongan emosi kolektif masyarakat terlebih dahulu, baru kemudian diperkuat oleh konten kreator yang “menunggangi” momentum tersebut. Sementara itu, dari perspektif kebijakan, Pak Joni menegaskan bahwa konflik tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan pajak, tetapi lebih kepada kegagalan komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Pernyataan ini memperkuat bahwa pemberitaan di media sosial bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga

.....

memperbesar dampak dari kesalahan komunikasi tersebut.

Jika dianalisis menggunakan teori agenda setting, maka media sosial dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penentu isu apa yang dianggap penting oleh publik. Topik kenaikan pajak yang awalnya bersifat lokal berubah menjadi isu nasional karena intensitas pemberitaan dan interaksi di media sosial yang tinggi.

Dengan demikian, pemberitaan demonstrasi Pati di media sosial dapat dipahami sebagai proses yang bersifat:

1. Cepat (real-time dan viral),
2. Partisipatif (melibatkan masyarakat luas),
3. Tidak sepenuhnya terverifikasi di tahap awal,
4. Serta dipengaruhi oleh algoritma dan tren digital.

Teori Agenda Setting yang dikemukakan oleh McCombs dan Shaw menjelaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam kasus demonstrasi Pati tahun 2025, media sosial berhasil menjadikan isu kenaikan PBB sebagai topik utama yang mendominasi ruang diskusi publik. Intensitas pemberitaan, penggunaan hashtag, serta penyebaran konten visual demonstrasi secara masif menyebabkan masyarakat memberikan perhatian besar terhadap isu tersebut.

Hubungan antara agenda setting dan opini publik terlihat ketika isu kenaikan PBB yang awalnya merupakan kebijakan lokal berubah menjadi perhatian nasional. Media sosial terlebih dahulu membentuk agenda publik melalui penyebaran informasi yang berulang. Setelah isu tersebut menjadi agenda utama, masyarakat mulai membentuk penilaian dan sikap terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dengan kata lain, agenda setting menjadi tahap awal yang mempengaruhi terbentuknya opini publik.

Tidak hanya menentukan isu yang dianggap penting, media sosial juga mempengaruhi bagaimana publik memahami isu tersebut. Dalam pemberitaan demonstrasi Pati, aspek yang paling banyak ditonjolkan adalah besarnya kenaikan pajak, kemarahan masyarakat, dan respons Bupati yang dianggap arogan. Akibatnya, opini publik lebih banyak terbentuk pada persepsi bahwa pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya second level agenda setting, yaitu ketika media tidak hanya menentukan isu, tetapi juga atribut atau cara pandang terhadap isu tersebut.

Analisis Pembentukan Opini Publik terhadap Demonstrasi Pati 2025

Pembentukan opini publik dalam kasus demonstrasi Pati tahun 2025 menunjukkan pola yang kompleks dan berlapis. Opini publik tidak hanya dibentuk oleh satu aktor, tetapi oleh kombinasi antara masyarakat, media sosial, konten kreator, dan media mainstream.

Menurut Andromeda Mercury, framing media online memiliki peran besar dalam membangun simpati publik. Visualisasi massa, narasi ketidakadilan, serta ekspresi kekecewaan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya opini publik secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa aspek emosional dalam pemberitaan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik.

Di sisi lain, Raffi Mulya menekankan bahwa algoritma media sosial bekerja berdasarkan perilaku pengguna. Opini publik yang sudah terbentuk akan memperkuat algoritma, sehingga konten dengan isu serupa terus muncul dan memperluas jangkauan informasi. Ini menyebabkan efek “echo chamber”, di mana publik semakin yakin dengan opini yang mereka konsumsi.

Sementara itu, dari sudut pandang kebijakan, Pak Joni menjelaskan bahwa masyarakat Pati terbagi menjadi beberapa kelompok: pro pemerintah, kontra, dan netral. Namun, dominasi opini di media sosial cenderung memperkuat suara kelompok yang paling vokal, sehingga menciptakan

kesan bahwa opini tersebut mewakili keseluruhan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori agenda setting, maka terlihat bahwa media (khususnya media sosial dan media online) tidak secara langsung menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tetapi menentukan isu apa yang harus dianggap penting. Dalam kasus ini, isu “ketidakadilan kebijakan pajak” menjadi agenda utama yang terus diulang, sehingga membentuk persepsi kolektif masyarakat.

Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan adanya agenda setting tingkat kedua (second level agenda setting), di mana bukan hanya isu yang ditentukan, tetapi juga bagaimana isu tersebut dipersepsikan. Misalnya:

1. Pemerintah diposisikan sebagai pihak yang tidak responsif,
2. Demonstrasi dipersepsikan sebagai representasi suara rakyat,
3. Konflik dipandang sebagai akibat dari ketidakadilan kebijakan.

Namun demikian, terdapat risiko dalam pembentukan opini publik ini, yaitu munculnya penilaian yang prematur akibat kurangnya verifikasi informasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan narasumber bahwa banyak masyarakat hanya membaca judul tanpa memahami isi berita secara utuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan opini publik dalam kasus ini dipengaruhi oleh:

1. Framing media online,
2. Peran konten kreator,
3. Algoritma media sosial,
4. Tingkat literasi digital masyarakat,
5. Serta dinamika emosional publik.

Sintesis Analisis

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pemberitaan dan opini publik dalam kasus demonstrasi Pati 2025 saling berkaitan erat dan membentuk siklus yang terus berulang. Media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memperkuat opini publik, yang kemudian kembali mempengaruhi arah pemberitaan.

Dalam perspektif teori agenda setting, media sosial telah mengambil peran yang sangat dominan dalam menentukan agenda publik. Sementara itu, media mainstream berperan sebagai penguat legitimasi melalui verifikasi informasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era digital, kekuasaan dalam membentuk opini publik tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama, melainkan tersebar kepada berbagai aktor, termasuk masyarakat itu sendiri. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang terjadinya bias informasi dan penguatan opini yang tidak selalu berbasis fakta.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat benang merah yang kuat antara agenda setting dan pembentukan opini publik. Agenda setting terjadi ketika media sosial dan media online secara intensif mengangkat isu kenaikan PBB sebagai isu utama. Intensitas pemberitaan tersebut kemudian memengaruhi perhatian masyarakat dan membentuk persepsi kolektif. Setelah agenda publik terbentuk, masyarakat mulai memberikan penilaian terhadap pemerintah daerah, sehingga lahirlah opini publik yang sebagian besar bernada negatif. Dengan demikian, opini publik dalam kasus demonstrasi Pati merupakan hasil dari proses agenda setting yang diperkuat oleh algoritma media sosial, framing pemberitaan, dan interaksi pengguna di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Analisis Pembentukan Opini Publik pada Pemberitaan Aksi Demonstrasi di Pati Tahun 2025 melalui Media Sosial*”, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah mengubah pola distribusi informasi dengan menjadi sumber utama penyebaran informasi, sementara media arus utama berperan dalam verifikasi informasi. Pembentukan opini publik dipengaruhi oleh *framing* media, aktivitas konten kreator, algoritma platform, dan respons masyarakat sehingga isu kenaikan pajak di Pati menjadi perhatian nasional. Berdasarkan teori *agenda setting*, media sosial juga berperan dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Selain itu, rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat belum melakukan verifikasi informasi secara menyeluruh. Dengan demikian, media sosial memiliki peran dominan sebagai penyebar informasi, penguat isu, dan ruang interaksi publik yang dinamis.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat meningkatkan literasi digital dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi publik yang transparan dan responsif untuk mencegah konflik. Media mainstream diharapkan tetap menjaga profesionalisme melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, sedangkan konten kreator perlu lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut peran algoritma media sosial serta pengaruh intervensi politik digital terhadap pembentukan opini publik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arifin, Anwar. *Opini Publik*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2011.
 Budiharsono, Suyuti S. *Politik Komunikasi*. Jakarta: Grasindo, 2004.
 Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
 Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
 Setiawan, Amiruddin. *Opini Publik: Teori dan Praktik*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025.
 Sitepu, Antonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Jurnal Ilmiah

- Yanto, dan Fera Indasari. “Pembentukan Opini Publik pada Media Massa: Program Satu Milyar Satu Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati Panorama Kota Bengkulu.” Dalam *Seminar Ilmu-Ilmu Sosial: Communication Series 3*.

Karya Ilmiah

- Betty R.F.S. Soemirat. *Opini Publik (Modul 1)*.
 Universitas Diponegoro. “BAB II.” Diakses dari:
https://eprints.undip.ac.id/61394/3/BAB_II.pdf

Artikel

- “Opini Publik.” Publikasimedia. Diakses pada 27 April 2026.
<https://www.publikasimedia.com/opini-publik#87e64613-f278-4dc3-af18-43760e3a144c-link>

- Institute for Criminal Justice Reform. “Kriminalisasi Pentolan Demo Pati: Penggunaan Pasal Pidana Tidak Tepat dan Menunjukkan Perlunya Perbaikan Sistem dalam RKUHAP.”
-

- Diakses pada 23 April 2026. <https://icjr.or.id/kriminalisasi-pentolan-demo-pati-menggunakan-pasal-tidak-tepat-dan-menunjukkan-perlunya-perbaikan-sistem-dalam-rkuhap/>
- Drone Emprit. "Sentimen Publik terhadap Kenaikan PBB Pati, Cirebon, Jombang, Bone, dll." Diakses dari: <https://pers.droneemprit.id/sentimen-publik-terhadap-kenaikan-pbb-pati-cirebon-jombang-bone-dll/>
- Tempo. "Unjuk Rasa Warga Pati akibat Kenaikan Pajak Menjalar ke Cirebon dan Bone." Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/unjuk-rasa-warga-pati-akibat-kenaikan-pajak-gilaan-menjalar-ke-cirebon-dan-bone--2060160>
-